An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

ANALISIS KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA KOPERASI ALKAFFAH BINJAI

Nurul Fadhilah Ramadhani[1], Nadila Elsa Fitria Utami[2], Sindi Adelia[3], Sekar Anjani[4], Naja Cahya Syahfira[5], Muhammad Nur Iqbal[6]
Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai
nurulramadhani.mhs@insan.ac.id[1], nadilaelsaisa.mhs@insan.ac.id[2], sindiadelia.mhs@insan.ac.id[3], sekaranjani.mhs@insan.ac.id[4], najacahyashafira.mhs@insan.ac.id[5], muhammadnuriqbal@insan.ac.id[6]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keunggulan dan kelemahan implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) pada Koperasi Alkaffah Binjai serta membandingkannya dengan akad murabahah dan ijarah. Dominasi akad murabahah di industri keuangan syariah sering kali dikritik karena rentan mengalami distorsi menjadi pembiayaan berbasis utang fiktif. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keunggulan akad MMQ di Koperasi Alkaffah terletak pada penerapan prinsip kemitraan sejati melalui skema bagi risiko (risk sharing) dan keadilan distribusi kepemilikan aset jangka panjang. Koperasi ini juga berhasil menjaga kemurnian akad murabahah dengan menyediakan objek barang secara riil. Namun, kelemahan utama MMQ terletak pada kompleksitas administrasi dan tingginya risiko operasional, sehingga Koperasi Alkaffah terpaksa membatasi penyaluran pembiayaan MMQ khusus untuk anggota internal (staf/pegawai) guna memitigasi risiko gagal bayar dari pihak luar. Simpulan penelitian menegaskan bahwa MMQ merupakan solusi pembiayaan hibrida yang sangat ideal untuk menghindari distorsi akad, meskipun penerapannya masih terbatas karena membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Kata Kunci: *Musyarakah Mutanaqisah; Koperasi Syariah; Murabahah; Ijarah; Pembiayaan Syariah.*

Abstract

This study aims to analyze the advantages and disadvantages of implementing the Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) contract at Koperasi Alkaffah Binjai and compare it with murabahah and ijarah contracts. The dominance of the murabahah contract in the Islamic financial industry is often criticized for its vulnerability to distortion into fictitious debt-based financing. This field research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including semi-structured interviews, observation, and documentation. The results indicate that the primary advantage of the

MMQ contract at Koperasi Alkaffah lies in its true partnership principle through a risk-sharing scheme and equitable long-term asset ownership distribution. The cooperative also successfully maintains the purity of the murabahah contract by providing real physical goods. However, the main disadvantage of MMQ lies in its administrative complexity and high operational risk, forcing Koperasi Alkaffah to limit MMQ financing exclusively to internal members (staff/employees) to mitigate default risks from external parties. The study concludes that MMQ is an ideal hybrid financing solution to avoid contract distortion, although its implementation remains limited due to the high level of trust required.

Keywords: *Musyarakah Mutanaqisah; Islamic Cooperative; Murabahah; Ijarah; Islamic Financing*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada sektor koperasi syariah. Kehadiran koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai sarana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut terlihat pada penggunaan akad pembiayaan syariah yang semakin beragam, seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah mutanaqisah. Pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat ini menuntut pengelolaan sumber daya manusia secara optimal, di mana efektivitas kepemimpinan Islami dan penguatan budaya organisasi berbasis syariah memegang peranan krusial dalam meningkatkan produktivitas serta performa kelembagaan (Waqqosh et al., 2023).

Dalam praktiknya, koperasi syariah mulai berupaya mengembangkan akad yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan lembaga, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan kemitraan kepada anggota. Menurut Ascarya, perkembangan akad syariah dalam lembaga keuangan modern bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang bebas riba serta menekankan prinsip bagi hasil dan kerja sama yang adil (Ascarya, 2006). Oleh karena itu, pemilihan akad dalam koperasi syariah menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas layanan pembiayaan kepada masyarakat.

Di samping ketepatan pemilihan akad, stabilitas pertumbuhan lembaga keuangan syariah juga sangat bergantung pada optimalisasi tata kelola internal serta kemampuan manajemen dalam mengalokasikan dan mengendalikan sumber daya manusia yang dimiliki (Waqqosh et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan implementasi produk pembiayaan tidak terlepas dari peran manajerial lembaga dalam menata sistem operasionalnya.Selain sebagai lembaga ekonomi, koperasi syariah juga memiliki fungsi sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui sistem keuangan yang lebih etis dan sesuai syariat Islam. Prinsip keadilan dalam koperasi syariah tercermin dari adanya keterbukaan akad, pembagian keuntungan yang disepakati bersama, serta larangan terhadap praktik riba dan eksploitasi. Dengan demikian, keberadaan koperasi syariah bukan hanya menjadi alternatif lembaga keuangan, tetapi juga bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi

dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَالتَّقْوٰىۖ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوْا

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa…"*
Ayat tersebut menjadi dasar penting bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam harus dibangun atas prinsip kerja sama dan saling membantu dalam kebaikan.

Musyarakah mutanaqisah (MMQ) merupakan salah satu akad yang mulai banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah karena dianggap lebih sesuai dengan prinsip syirkah dalam Islam. Akad ini merupakan bentuk kerja sama kepemilikan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara bertahap hingga salah satu pihak menjadi pemilik penuh atas aset yang dibiayai. Dalam praktiknya, akad MMQ mengombinasikan konsep musyarakah dan ijarah sehingga memungkinkan adanya pembagian kepemilikan sekaligus pembayaran sewa atas porsi aset yang dimiliki lembaga keuangan. Menurut penelitian Emi Sri Rahayu Fatimah, Nasrullah bin Sapa, dan Abdi Wijaya, karena mengutamakan prinsip kemitraan dan kepemilikan secara bertahap dibandingkan pembiayaan berbasis utang, akad musyarakah mutanaqisah dianggap sebagai alternatif pembiayaan syariah yang lebih adil (Fatimah et al., 2024). Kondisi tersebut menjadikan MMQ semakin relevan digunakan pada koperasi syariah yang mengutamakan asas kekeluargaan dan tolong-menolong. Penerapan akad MMQ juga dinilai mampu memberikan rasa tanggung jawab bersama antara lembaga dan anggota karena kedua belah pihak sama-sama memiliki bagian kepemilikan terhadap aset yang dibiayai. Sistem ini berbeda dengan pembiayaan konvensional yang umumnya hanya menempatkan nasabah sebagai pihak yang memiliki kewajiban pembayaran utang. Dalam MMQ, hubungan antara koperasi dan anggota lebih menekankan konsep kemitraan sehingga risiko dan manfaat pembiayaan dapat dirasakan secara bersama-sama. Prinsip tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

أَخِيْهِ عَوْنِ فِيْ الْعَبْدُ كَانَ مَا الْعَبْدِ عَوْنِ فِيْ اللهُ وَ

Artinya: *"Dan Allah Senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu suka menolong saudaranya."* (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan pentingnya semangat kerja sama dan saling membantu dalam kegiatan muamalah Islam.

Di sisi lain, praktik pembiayaan syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad murabahah. Akad murabahah dinilai lebih mudah diterapkan karena memiliki mekanisme yang sederhana dan memberikan kepastian keuntungan bagi lembaga keuangan. Akan tetapi, dominasi murabahah sering menimbulkan kritik karena dianggap terlalu berorientasi pada margin keuntungan tetap sehingga kurang mencerminkan prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam. Selain murabahah, akad ijarah juga banyak digunakan terutama dalam pembiayaan jasa dan pemanfaatan aset. Namun, ijarah memiliki keterbatasan karena tidak secara langsung memberikan perpindahan kepemilikan aset kepada nasabah. Menurut Mardani, murabahah lebih menekankan transaksi jual beli, sedangkan ijarah berfokus pada pemanfaatan barang atau jasa tanpa perpindahan hak milik secara langsung (Mardani, 2012). Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa setiap akad memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam implementasinya pada lembaga keuangan syariah. Perbedaan karakteristik antarakad tersebut menyebabkan lembaga keuangan syariah perlu menyesuaikan jenis akad dengan kebutuhan anggota serta jenis pembiayaan yang dilakukan.

Pemilihan akad yang tepat akan membantu terciptanya transaksi yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan murabahah, ijarah, dan MMQ menjadi hal penting agar praktik pembiayaan tidak hanya menguntungkan lembaga, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi anggota koperasi. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…"*
Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Koperasi Alkaffah sebagai salah satu koperasi berbasis syariah turut menerapkan akad musyarakah mutanaqisah dalam kegiatan pembiayaannya. Penggunaan akad ini menjadi menarik untuk diteliti karena MMQ dianggap memiliki konsep yang lebih kompleks dibanding murabahah maupun ijarah. Selain membutuhkan pemahaman syariah yang baik, implementasi MMQ juga memerlukan sistem administrasi dan pengelolaan risiko yang lebih terstruktur. Dalam praktiknya, koperasi harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga dan anggota agar prinsip keadilan tetap terwujud. Penelitian Istianah Zainal Asyiqin dan Fe Fikran Alfurqon menjelaskan bahwa MMQ memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem pembiayaan syariah karena lebih menekankan prinsip risk sharing dibanding risk transfer yang lazim terjadi pada pembiayaan konvensional (Asyiqin & Alfurqon, 2024). Oleh sebab itu, penerapan MMQ pada koperasi syariah memerlukan analisis yang mendalam agar dapat diketahui efektivitas dan tantangan implementasinya. Selain itu, penerapan MMQ pada koperasi syariah juga membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara koperasi dan anggota. Sistem kepemilikan bersama dalam MMQ menuntut adanya keterbukaan informasi, kedisiplinan pembayaran, serta komitmen kedua belah pihak dalam menjalankan akad sesuai kesepakatan. Apabila pengelolaan dilakukan dengan baik, akad MMQ berpotensi menjadi salah satu model pembiayaan syariah yang mampu menciptakan hubungan kemitraan yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Prinsip amanah dalam transaksi ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

رَبَّهٗ ۗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ اَمَانَتَهٗ ۗ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ

Artinya: *"Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya…"*

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keunggulan dan kelemahan akad musyarakah mutanaqisah pada Koperasi Alkaffah serta membandingkannya dengan akad murabahah dan ijarah. Analisis ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana akad MMQ mampu memberikan solusi pembiayaan syariah yang lebih adil, fleksibel, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya terkait implementasi akad pembiayaan pada koperasi syariah di Indonesia. Penelitian mengenai implementasi MMQ juga penting dilakukan karena perkembangan lembaga keuangan syariah membutuhkan inovasi akad yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan MMQ sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi koperasi syariah dalam mengembangkan sistem pembiayaan yang

lebih optimal dan berkeadilan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih muamalah*: "Pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya."* Kaidah tersebut menunjukkan bahwa pengembangan akad dalam ekonomi syariah diperbolehkan selama tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. KAJIAN TEORI

1. Teori Akad Musyarakah Mutanaqisah

Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) merupakan salah satu bentuk akad syirkah yang menggabungkan konsep kemitraan (musyarakah) dengan mekanisme pengalihan kepemilikan secara bertahap. Dalam akad ini, dua pihak atau lebih bekerja sama untuk memiliki suatu aset, kemudian porsi kepemilikan salah satu pihak berkurang secara bertahap karena dibeli oleh pihak lainnya hingga seluruh kepemilikan beralih kepada salah satu pihak. Konsep ini dikenal sebagai diminishing partnership atau kemitraan yang terus berkurang. Akad Musyarakah Mutanaqisah dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan syariah yang lebih mencerminkan prinsip bagi hasil dan kepemilikan bersama dibandingkan akad jual beli. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad ini banyak digunakan pada pembiayaan aset produktif maupun pembiayaan kepemilikan rumah. Keberadaan akad ini menunjukkan perkembangan inovasi produk keuangan syariah yang berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Syariah.

Musyarakah Mutanaqisah merupakan bentuk kerja sama kepemilikan aset antara dua pihak atau lebih yang disertai pengurangan porsi kepemilikan salah satu pihak secara bertahap sampai seluruh kepemilikan berpindah kepada pihak lainnya. Mekanisme tersebut menjadikan akad MMQ memiliki karakteristik kemitraan yang berbeda dengan akad pembiayaan berbasis jual beli karena hubungan para pihak didasarkan pada kepemilikan bersama atas suatu aset. Dengan demikian, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki selama masa akad berlangsung (Hosen, 2020).

2. Landasan Syariah Akad Musyarakah Mutanaqisah

Akad Musyarakah Mutanaqisah didasarkan pada prinsip syirkah yang telah dikenal dalam fikih muamalah Islam. Landasan syariahnya bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama yang membolehkan kerja sama usaha maupun kepemilikan aset selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia, pelaksanaan akad MMQ juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad MMQ merupakan akad musyarakah yang disertai perpindahan kepemilikan porsi modal salah satu pihak kepada pihak lain secara bertahap. Oleh karena itu, akad ini dipandang sesuai dengan prinsip syariah karena menekankan aspek kemitraan, keadilan, dan pembagian risiko secara proporsional antara para pihak (Lahuri et al., 2025).

Penerapan MMQ dalam lembaga keuangan syariah juga dianggap sebagai bentuk implementasi prinsip profit and loss sharing yang menjadi karakteristik utama sistem ekonomi Islam. Melalui mekanisme tersebut, hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah tidak hanya bersifat kreditur dan debitur, tetapi lebih menekankan pada hubungan kemitraan. Penerapan MMQ dalam lembaga keuangan syariah juga dianggap sebagai bentuk implementasi prinsip profit and

loss sharing yang menjadi karakteristik utama sistem ekonomi Islam. Melalui mekanisme tersebut, hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah tidak hanya bersifat kreditur dan debitur, tetapi lebih menekankan pada hubungan kemitraan. Perspektif muamalah ini menegaskan bahwa kepemimpinan operasional dalam mengawal akad syariah harus didasarkan pada aktivitas yang membimbing, menuntun, dan menunjukkan jalan yang diberkahi oleh Allah SWT demi kemaslahatan bersama (Waqqosh et al., 2023). Oleh karena itu, akad MMQ sering dipandang sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang lebih dekat dengan nilai-nilai ekonomi Islam dibandingkan pembiayaan berbasis utang (Husein, 2019).

3. Konsep Dasar Akad Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang serta keuntungan (margin) yang disepakati kepada pembeli. Dalam lembaga keuangan syariah, akad murabahah digunakan ketika lembaga membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati. Harga jual tersebut bersifat tetap sampai akhir masa pembiayaan sehingga jumlah angsuran yang dibayar nasabah dapat diketahui sejak awal akad. Akad murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah karena mekanismenya relatif sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Selain itu, akad ini memberikan kepastian mengenai jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah selama masa pembiayaan berlangsung (Asyiqin & Alfurqon, 2024).

Dalam praktiknya, murabahah menempatkan lembaga keuangan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Objek transaksi harus diketahui secara jelas baik dari segi harga, kualitas, maupun spesifikasinya. Keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan berasal dari margin penjualan yang telah disepakati pada saat akad dilakukan. Oleh karena itu, akad murabahah termasuk kategori akad tijarah atau akad komersial yang berorientasi pada transaksi jual beli.

4. Konsep Dasar Akad Ijarah

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti perpindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam lembaga keuangan syariah, akad ijarah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemanfaatan aset maupun jasa secara syariah. Melalui akad ini, pihak penyewa memperoleh manfaat dari aset yang disewakan, sedangkan kepemilikan aset tetap berada pada pihak yang menyewakan. Oleh karena itu, fokus utama akad ijarah terletak pada pemanfaatan manfaat (usufruct) suatu barang, bukan pada perpindahan kepemilikan barang tersebut.

Dalam perkembangannya, akad ijarah sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan aset produktif, kendaraan, maupun properti. Besarnya ujrah atau biaya sewa ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak pada saat akad dilakukan. Selama masa sewa berlangsung, tanggung jawab atas kepemilikan aset tetap berada pada pihak yang menyewakan, sedangkan penyewa berkewajiban membayar ujrah sesuai kesepakatan yang telah ditentukan (Hidayah et al., 2025). Secara praktis, instrumen ini diklasifikasikan sebagai natural certainty contracts yang menjadi solusi pembiayaan bagi masyarakat yang

membutuhkan kemanfaatan suatu barang atau jasa tanpa harus terbebani oleh penyediaan modal besar untuk membelinya (Iqbal & Yadi, 2024).

5. Perbandingan Konseptual Akad Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah, dan Ijarah

Secara konseptual, akad Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah, dan Ijarah memiliki karakteristik yang berbeda meskipun sama-sama digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Musyarakah Mutanaqisah berlandaskan prinsip kemitraan dan kepemilikan bersama yang disertai pengalihan porsi kepemilikan secara bertahap. Murabahah berlandaskan prinsip jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang telah diketahui sejak awal akad. Sementara itu, ijarah berlandaskan prinsip sewa-menyewa yang berorientasi pada pemanfaatan manfaat suatu aset tanpa perpindahan kepemilikan. Perbedaan mendasar tersebut menunjukkan bahwa ketiga akad memiliki dasar hukum, mekanisme transaksi, dan hubungan hukum yang berbeda antara lembaga keuangan dan nasabah (Asyiqin & Alfurqon, 2024).

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing akad tidak dijelaskan pada bagian kajian teori, melainkan akan dianalisis secara lebih mendalam pada bagian hasil dan pembahasan berdasarkan praktik penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah pada Koperasi Alkaffah Binjai. Oleh karena itu, kajian teori ini difokuskan pada pemahaman konseptual dan landasan dasar dari masing-masing akad sebagai dasar analisis penelitian.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(field research)* untuk memahami penerapan akad musyarakah mutanaqisah pada Koperasi Alkaffah, termasuk keunggulan, kelemahan, serta perbandingannya dengan akad murabahah dan ijarah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara deskriptif. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2013).

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan staf pembiayaan dan pengelola koperasi yang terlibat dalam pelaksanaan akad. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen koperasi, dan literatur terkait pembiayaan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pembiayaan dan kendala penerapan akad, observasi dilakukan untuk melihat praktik pembiayaan secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah, memilih, dan menyusun data sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) pada Koperasi Alkaffah Binjai serta perbandingannya dengan akad murabahah dan ijarah dalam praktik pembiayaan syariah. Analisis dilakukan dengan melihat mekanisme pelaksanaan akad, sistem pembayaran, pembagian keuntungan, serta tingkat kemudahan dan manfaat yang diperoleh anggota koperasi. Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada keunggulan dan kelemahan masing-masing akad untuk mengetahui efektivitas penerapan MMQ dibandingkan akad murabahah dan ijarah. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai akad pembiayaan yang paling sesuai diterapkan dalam mendukung kebutuhan pembiayaan syariah pada Koperasi Alkaffah Binjai.

Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Koperasi Alkaffah

Adapun penerapan menurut Ibu yang kami panggil "Umi" yang merupakan staf Koperasi Alkaffah menjelaskan implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada koperasi sebagai berikut:

> *"Akad musyarakah mutanaqisah di Koperasi Alkaffah hanya diberikan kepada anggota internal koperasi, yaitu staf atau pegawai koperasi. Kebijakan ini diterapkan karena sebelumnya pernah terjadi keterlambatan pembayaran dari pihak luar sehingga menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, pembiayaan MMQ difokuskan kepada anggota internal yang lebih mudah diawasi dan memiliki tingkat tanggung jawab yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa penerapan akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) di Koperasi Alkaffah dilakukan secara terbatas kepada anggota internal sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan koperasi sekaligus meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Prinsip tersebut sejalan dengan perintah Allah Swt. untuk menjaga amanah sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 58:

اَهْلِهَاۙ اِلٰٓى الْاَمٰنٰتِ تُؤَدُّوا اَنْ يَأْمُرُكُمْ اللّٰهَ اِنَّ ۞

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”*

Dalam praktiknya, akad MMQ digunakan untuk pembiayaan rumah atau aset bernilai besar. Koperasi dan anggota memiliki porsi kepemilikan bersama terhadap aset yang dibiayai, kemudian anggota membeli bagian kepemilikan koperasi secara bertahap hingga aset sepenuhnya menjadi miliknya. Mekanisme ini mencerminkan konsep kemitraan dan perpindahan kepemilikan secara bertahap yang menjadi karakteristik utama akad musyarakah mutanaqisah (Rohman et al., 2025). Sistem tersebut juga memberikan keadilan bagi kedua belah pihak karena hak dan kewajiban dibangun atas dasar kerja sama, bukan hubungan kreditur dan debitur semata. Prinsip pelaksanaan akad tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah saw:

حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ حَلاَلاً حَرَّمَ شَرْطًا إِلاَّ شُرُوطِهِمْ عَلَى وَالْمُسْلِمُونَ

Artinya: *"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* (HR. Tirmidzi).

Selain pembiayaan rumah, koperasi juga pernah memberikan pembiayaan barang elektronik seperti laptop dan telepon genggam. Namun, mekanisme yang digunakan lebih sesuai dengan akad murabahah. Dalam praktiknya, koperasi membeli barang yang dibutuhkan anggota kemudian menjualnya kembali dengan pembayaran secara angsuran sesuai kesepakatan. Koperasi tidak memberikan dana tunai kepada anggota, melainkan langsung menyediakan objek pembiayaan sehingga transaksi lebih sesuai dengan prinsip jual beli syariah. Menurut Wiroso, akad murabahah merupakan akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli (Wiroso, 2011).

Praktik tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الرِّبٰوا۟ ۗ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللّٰهُ وَاَحَلَّ

Artinya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

Langkah Koperasi Alkaffah yang langsung menyediakan objek barang secara riil dan tidak memberikan dana tunai kepada anggota menunjukkan kepatuhan yang kuat terhadap prinsip fikih muamalah. Praktik ini secara langsung meminimalisasi risiko distorsi akad murabahah yang marak terjadi di industri keuangan syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Setiawan, Apridho, dan Hendra (2025), banyak lembaga keuangan syariah besar yang mengalami reduksi makna murabahah menjadi sekadar pembiayaan berbasis utang (kontrak kertas) karena lemahnya implementasi kepemilikan barang secara fisik oleh lembaga. Dengan demikian, penerapan murabahah yang rill di Koperasi Alkaffah ini berhasil menghindari jebakan "murabahah bayangan" yang dikritik dalam industri perbankan modern (Setiawan et al., 2025).

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran angsuran terkadang terjadi akibat kondisi ekonomi anggota. Dalam menghadapi situasi tersebut, Koperasi Alkaffah mengutamakan musyawarah dengan memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran agar anggota tetap mampu memenuhi kewajibannya. Kebijakan ini mencerminkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan keadilan sosial dalam ekonomi Islam (Rohman et al., 2025). Pendekatan tersebut sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 280:

مَيْسَرَةٍ اِلٰى فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُوْ كَانَ وَاِنْ

Artinya: *"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan."*

Pembatasan penerapan MMQ kepada anggota internal juga memberikan keuntungan dalam aspek pengawasan dan pengendalian risiko. Kedekatan hubungan antara pengurus dan anggota memudahkan pemantauan kemampuan pembayaran serta percepatan penyelesaian apabila muncul kendala.

Menurut Hany Mareta, Hariono, dan Nurul Susanti (2022), pengawasan yang efektif merupakan bagian penting dalam manajemen risiko lembaga keuangan syariah untuk menjaga stabilitas operasional dan kualitas pembiayaan (Hany et al., 2022). Kebijakan tersebut selaras dengan hadis Rasulullah saw:

ضِرَارَ وَلاَ ضَرَرَ لاَ

Artinya: *"Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain."* (HR. Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah)

Dengan demikian, implementasi akad musyarakah mutanaqisah di Koperasi Alkaffah telah menerapkan prinsip syariah melalui sistem kepemilikan bersama, perpindahan kepemilikan secara bertahap, penyelesaian pembiayaan berbasis musyawarah, serta pengelolaan risiko yang mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga keberlangsungan koperasi dan kemaslahatan anggota.

Perbandingan Musyarakah Mutanaqisah dengan Murabahah

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu yang akrab dipanggil "Umi" selaku staf Koperasi Alkaffah menjelaskan perbedaan utama antara akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) dan murabahah terletak pada proses akad yang dilakukan.

> *"Perbedaan yang paling jelas terdapat pada proses akadnya. Pada murabahah, koperasi membeli barang yang dibutuhkan anggota kemudian menjualnya kembali kepada anggota dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan. Sedangkan pada musyarakah mutanaqisah, koperasi dan anggota sama-sama memiliki aset yang dibiayai, kemudian anggota membeli porsi kepemilikan koperasi secara bertahap sampai aset tersebut menjadi milik anggota sepenuhnya."*

Berdasarkan keterangan tersebut, akad murabahah di Koperasi Alkaffah digunakan untuk pembiayaan barang konsumtif seperti laptop, telepon genggam, dan barang elektronik lainnya. Dalam akad ini, koperasi bertindak sebagai penjual setelah terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan anggota. Selanjutnya, barang tersebut dijual kepada anggota dengan harga yang telah disepakati beserta margin keuntungan yang diketahui sejak awal akad. Mekanisme ini memberikan kepastian jumlah pembayaran sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam operasional koperasi. Menurut Soemitra (2019), murabahah merupakan akad jual beli yang paling banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah karena memiliki mekanisme yang sederhana dan risiko yang relatif rendah (Soemitra, 2019).

Sementara itu, akad musyarakah mutanaqisah diterapkan pada pembiayaan aset bernilai besar, terutama rumah. Dalam akad ini, koperasi dan anggota berperan sebagai mitra yang sama-sama memiliki bagian kepemilikan atas aset yang dibiayai. Kepemilikan koperasi kemudian berkurang secara bertahap seiring pembayaran yang dilakukan anggota hingga seluruh kepemilikan berpindah kepada anggota. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa MMQ tidak hanya berorientasi pada transaksi jual beli, tetapi juga mengandung unsur kemitraan dan perpindahan kepemilikan secara bertahap (Fatimah et al., 2024).

Perbedaan proses akad tersebut menyebabkan murabahah lebih praktis untuk pembiayaan kebutuhan konsumtif, sedangkan MMQ lebih sesuai digunakan untuk pembiayaan aset jangka panjang. Pada murabahah, akad dilakukan satu kali melalui transaksi jual beli dengan harga yang telah ditentukan sejak awal. Sebaliknya, MMQ memerlukan pengaturan kepemilikan bersama serta proses pengalihan porsi kepemilikan secara bertahap sehingga administrasinya lebih kompleks. Hal ini sejalan dengan penelitian Abdullah (2022) yang menyatakan bahwa murabahah lebih mudah diterapkan dalam praktik lembaga keuangan syariah dibandingkan akad berbasis kemitraan seperti MMQ (Abdullah, 2022).

Meskipun memiliki mekanisme yang berbeda, kedua akad tersebut diterapkan sesuai prinsip syariah dan kebutuhan anggota koperasi. Murabahah digunakan ketika anggota membutuhkan barang tertentu yang dapat diperjualbelikan secara langsung, sedangkan MMQ digunakan ketika pembiayaan memerlukan pola kepemilikan bersama yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan secara bertahap. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua akad pada Koperasi Alkaffah terletak pada bentuk hubungan antara koperasi dan anggota, yaitu hubungan jual beli dalam murabahah serta hubungan kemitraan dalam musyarakah mutanaqisah.

Perbandingan Musyarakah Mutanaqisah dengan Ijarah

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu yang akrab dipanggil "Umi" selaku staf Koperasi Alkaffah menjelaskan bahwa perbedaan utama antara akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) dan ijarah terletak pada proses akad serta status kepemilikan aset yang menjadi objek pembiayaan.

> *"Pada akad musyarakah mutanaqisah, anggota dan koperasi sama-sama memiliki aset yang dibiayai, kemudian anggota membeli porsi kepemilikan koperasi secara bertahap sampai aset tersebut menjadi milik anggota sepenuhnya. Sedangkan pada akad ijarah, anggota hanya memanfaatkan barang atau jasa melalui sistem sewa tanpa adanya perpindahan kepemilikan selama masa akad berlangsung."*

Berdasarkan penjelasan tersebut, akad musyarakah mutanaqisah merupakan akad yang berorientasi pada kepemilikan aset. Dalam praktiknya, koperasi dan anggota memiliki porsi kepemilikan bersama terhadap aset yang dibiayai. Selanjutnya, anggota melakukan pembayaran secara berkala untuk mengurangi porsi kepemilikan koperasi hingga seluruh hak kepemilikan beralih kepada anggota. Mekanisme ini menjadikan MMQ lebih sesuai digunakan untuk pembiayaan rumah atau aset bernilai besar yang membutuhkan proses kepemilikan secara bertahap. Menurut Ritonga dan Hasibuan (2023), akad musyarakah mutanaqisah merupakan pengembangan akad syirkah yang memungkinkan terjadinya perpindahan kepemilikan aset secara bertahap melalui pembelian porsi modal salah satu pihak (Ritonga & Hasibuan, 2023).

Berbeda dengan MMQ, akad ijarah berfokus pada pemanfaatan manfaat suatu barang atau jasa. Dalam akad ini, anggota tidak memiliki kewajiban untuk membeli aset yang digunakan karena tujuan utamanya adalah memperoleh hak guna selama jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, hubungan yang terbentuk dalam ijarah adalah hubungan sewa-menyewa, sedangkan pada MMQ hubungan yang terbentuk adalah kemitraan kepemilikan. Huda dan Heykal (2010) menjelaskan bahwa ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran sewa tanpa diikuti perpindahan hak milik atas barang tersebut (Huda & Heykal, 2010).

Namun demikian, dalam lanskap keuangan syariah kontemporer, keterbatasan ijarah murni ini telah dieliminasi melalui skema inovatif berupa Ijarah Muntahiyah bi Al-Tamlik (IMBT), yakni sebuah kontrak hibrida yang memadukan transaksi sewa (ijarah) dengan opsi pemindahan kepemilikan aset melalui hibah maupun jual beli di akhir periode (Iqbal & Yadi, 2024). Adanya modifikasi ini menjadikan opsi pembiayaan berbasis sewa di lembaga keuangan syariah

memiliki variasi yang dinamis, hampir serupa dengan konsep kepemilikan bertahap pada MMQ.

Perbedaan proses akad tersebut menyebabkan tujuan kedua akad juga berbeda. Pada MMQ, tujuan akhir pembiayaan adalah kepemilikan penuh atas aset yang dibiayai melalui pembelian porsi modal secara berkala sejak awal. Sebaliknya, pada ijarah tujuan utamanya adalah memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa tanpa harus memiliki barang tersebut, kecuali bila sejak awal digunakan akad turunan seperti IMBT. Oleh karena itu, MMQ lebih sesuai digunakan untuk kebutuhan jangka panjang yang menekankan risk sharing kepemilikan modal sejak awal seperti pembiayaan rumah, sedangkan ijarah/IMBT lebih menekankan pada aspek penyediaan fasilitas pemanfaatan objek sewa terlebih dahulu.

Selain itu, MMQ memiliki unsur kerja sama yang lebih kuat karena koperasi dan anggota sama-sama memiliki keterlibatan dalam kepemilikan modal atas aset yang dibiayai. Kondisi ini berbeda dengan ijarah yang menempatkan koperasi sebagai pemilik tunggal aset dan anggota murni sebagai penyewa. Menurut Wahab (2020), akad musyarakah mutanaqisah memiliki tingkat kesesuaian syariah yang tinggi karena menggabungkan prinsip syirkah, jual beli, dan ijarah dalam satu rangkaian transaksi yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI (Wahab, 2020).

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara musyarakah mutanaqisah dan ijarah di Koperasi Alkaffah terletak pada tujuan dan proses akadnya. Musyarakah mutanaqisah mengarah pada perpindahan kepemilikan aset secara bertahap melalui konsep kemitraan modal bersama, sedangkan ijarah hanya memberikan hak pemanfaatan barang atau jasa tanpa perpindahan kepemilikan di awal kontrak. Perbedaan tersebut menjadikan kedua akad memiliki fungsi yang berbeda dalam praktik pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi.

Sintesis Analisis: Keunggulan dan Kelemahan Akad Musyarakah Mutanaqisah

Sintesis terhadap seluruh data lapangan menunjukkan bahwa akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) pada Koperasi Alkaffah Binjai memiliki keunggulan substantif yang tidak dimiliki oleh akad murabahah maupun ijarah. Keunggulan utamanya terletak pada implementasi keadilan distributif melalui skema risk sharing, di mana posisi koperasi dan anggota adalah mitra sejajar yang berbagi risiko dan kepemilikan aset sejak awal transaksi. Hal ini sangat berbeda dengan murabahah yang berfokus pada margin keuntungan tetap dari jual beli, atau ijarah yang membatasi hak anggota sebatas manfaat sewa. Selain itu, MMQ memberikan keunggulan finansial jangka panjang bagi anggota karena pembayaran berkala secara otomatis menambah porsi kepemilikan mereka hingga aset berpindah secara penuh di akhir masa akad. Karakteristik hibrida ini menjadikan MMQ sebagai solusi pembiayaan properti yang paling ideal, transparan, dan terhindar dari risiko transaksi fiktif yang marak dikritik pada dominasi akad murabahah di industri keuangan syariah.

Namun demikian, penelitian lapangan ini juga berhasil mengidentifikasi kelemahan mendasar dalam penerapan MMQ di Koperasi Alkaffah Binjai. Kelemahan utama akad ini terletak pada kompleksitas administrasi, tingginya kebutuhan akan keterbukaan informasi, serta rumitnya manajemen risiko operasional. Karakteristik akad yang membutuhkan komitmen jangka panjang dan

pembagian porsi modal yang dinamis ini menuntut adanya tingkat kepercayaan (high trust) yang sangat tinggi antara kedua belah pihak. Konsekuensi dari kelemahan tersebut tercermin dari kebijakan Koperasi Alkaffah yang terpaksa membatasi penyaluran produk MMQ hanya untuk ruang lingkup anggota internal (staf dan pegawai koperasi) akibat riwayat keterlambatan pembayaran dari pihak luar. Dengan kata lain, tingginya risiko gagal bayar (default risk) dan sulitnya pengawasan eksternal menjadi kelemahan fatal yang membuat akad MMQ di koperasi ini belum mampu diekspansi secara luas kepada masyarakat umum, tidak seperti akad murabahah yang jauh lebih sederhana dan minim risiko operasional.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan lapangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di Koperasi Alkaffah Binjai telah berjalan secara efektif dan relevan dengan karakteristik lembaga. Keunggulan utama akad MMQ pada koperasi ini terletak pada kuatnya substansi kemitraan kepemilikan (risk sharing) dan keadilan finansial jangka panjang bagi anggota melalui pengalihan porsi aset yang transparan. Karakteristik hibrida ini menjadikannya solusi pembiayaan properti yang ideal dan mampu menghindari risiko transaksi fiktif (paper transaction). Namun, kelemahan mendasar akad MMQ terletak pada kompleksitas administrasi, rumitnya manajemen risiko, serta tingginya kebutuhan akan keterbukan informasi. Konsekuensi dari kelemahan tersebut memaksa Koperasi Alkaffah menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat dengan membatasi penyaluran produk MMQ khusus bagi lingkungan internal pegawai demi memitigasi risiko gagal bayar dari pihak eksternal.

Di sisi lain, analisis komparatif menunjukkan batas tegas operasional antara ketiga akad tersebut. Koperasi Alkaffah berhasil menerapkan akad murabahah secara murni untuk pengadaan barang konsumtif dengan menyediakan objek fisik secara riil, sehingga berhasil menghindari jebakan "murabahah bayangan" yang marak terjadi di industri perbankan modern. Sementara itu, akad ijarah difokuskan murni pada pemandataan hak guna tanpa orientasi perpindahan kepemilikan aset. Melalui kombinasi ketepatan pemilihan ketiga akad ini, Koperasi Alkaffah Binjai berhasil mewujudkan keadilan operasional yang menempatkan hak serta kewajiban anggota secara proporsional.

F. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian yang dibahas, saran praktis ditujukan kepada pengelola Koperasi Alkaffah Binjai untuk mulai menyusun standardisasi administrasi yang lebih modern dan skema manajemen risiko yang terintegrasi. Hal ini diperlukan agar di masa mendatang kemanfaatan akad MMQ yang berkeadilan tidak hanya dinikmati oleh internal pegawai saja, melainkan dapat

diekspansi secara aman kepada anggota eksternal atau masyarakat luas. Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga disarankan untuk dilakukan secara berkala demi mempertahankan konsistensi pengadaan barang fisik pada akad murabahah agar terhindar dari celah reduksi makna akad.

Selanjutnya, bagi pengembangan teoritis dan penelitian lanjutan, disarankan kepada peneliti berikutnya untuk memperluas lokus kajian pada analisis kuantitatif terkait performa keuangan atau tingkat profitabilitas antara produk MMQ dengan murabahah di tingkat koperasi syariah. Penelitian masa depan juga dapat mengkaji perspektif, kesiapan regulasi, serta tingkat kepuasan anggota eksternal apabila skema kemitraan MMQ ini mulai diuji coba pada segmen pasar yang lebih heterogen, sehingga khazanah literatur mengenai inovasi produk diminishing partnership pada lembaga keuangan mikro Islam di Indonesia dapat terus berkembang.

G. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. (2022). Comparative analysis of murabahah and musyarakah mutanaqisah contract in Islamic home financing ownership at Islamic bank. *NUsantara Islamic Economic Journal*, *1*(2), 226–232. https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.260

Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Akad dan Produk Bank Syariah: BANK INDONESIA BANK INDONESIA Agustus 2006*. Rajawali Pers.

Asyiqin, I. Z., & Alfurqon, F. F. (2024). Musyarakah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing in Indonesia and Addressing Murabahah Vulnerabilities. *Jurnal Media Hukum*, *31*(II), 244–261.

Fatimah, E. S. R., Sapa, N. bin, & Wijaya, A. (2024). Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisyah Sebagai Alternatif Solusi Pembiayaan KPR Dalam Perbankan Syariah. *IQRO: Journal of Islamic Education*, *6*(2), 193–204. https://doi.org/10.24256/iqro.v6i2.4752

Hany, M., Hariono, & Susianti, N. (2022). Penerapan 5P dalam meminimalisir Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada PT . Bank NTB Syariah. *IBF JOURNAL : Perbankan Syariah & Keuangan 2*, *2*(2), 295–307.

Hidayah, N., Pudail, M., & Fitriyani, Y. (2025). Sharia Compliance Study: Implementation of Ijarah and Murabahah Contracts. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, *5*(2), 161–170. https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v5i2.2940

Hosen, N. (2020). Musyarakah Mutanaqishah. *L-IQTISHAD: JURNAL ILMU EKONOMI SYARIAH*, *1*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v1i2.2463

Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Prenada Media Group.

Husein, M. T. (2019). Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah. *Al Maal:*

Journal of Islamic Economics and Banking, *1*(1), 79. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1775

Iqbal, M. N., & Yadi, H. M. (2024). Instrumen Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Bentuk Service Finance Meliputi Akad Pembiayaan Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik Konsep Teori Dan Penerapannya Pada Bank Syariah. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *7*(4), 18518–18527.

Lahuri, S. bin, Nurafni, F., & Nasywa, A. Z. (2025). Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Indonesia. *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, *4*(4), 1077–1084. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i4.6217

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. PRENADAMEDIA GROUP.

Ritonga, V. A. N., & Hasibuan, R. R. A. (2023). Prosedur Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Syariah Indonesia KC Kuta Cane. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, *1*(4), 109–118. https://doi.org/10.61132/anggaran.v1i4.262

Rohman, A., Rosyadi, I., & Muthoifin. (2025). *Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqisah) dalam Transaksi Muamalah Maliyah*. Penerbit Muhammadiyah University Press.

Setiawan, W., Apridho, T., & Hendra. (2025). *AKAD MURABAHAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN*. *1*(1), 102–107.

Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Konteporer*. PRENADAMEDIA GROUP.

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R &. D*. Penerbit Alfabeta.

Wahab, A. (2020). Shariah Compliance Penerapan Akad Musharakah Mutanaqisah Pada Produk Kpr IB Muamalat Dengan Fatwa Dsn-Mui. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, *9*(2), 2615–2622.

Waqqosh, A., Aseandi, R., Dores, E., & Abdi, Y. (2023). *Influence of Islamic Leadership on Organizational Culture, Organizational Commitment on Employee Performance of Bank Syariah Indonesia (BSI) Binjai Branch Office*. *4*(1), 517–525. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-022-0_55

Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. Penerbit LPFE Usakti.